



Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim di Laut Natuna Utara (Perspektif Teori Mandala)

¹⁾Suherry, ²⁾Alfi Husni, ³⁾Azwan Rifa'i, ⁴⁾M.Dwiki Akbar, ⁵⁾Tomi Hamdan

^{1), 3), 4), 5)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

²⁾Program Studi Sosiologi, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email: suherry89@gmail.com

Abstract

As the largest archipelagic country in the world, Indonesia has a strategic interest in maintaining its maritime sovereignty, especially in the North Natuna Sea area which is rich in natural resources and has high geopolitical value. This area faces threats from China's unilateral claims through the Nine-Dash Line policy which is contrary to the principles of UNCLOS 1982 and disrupts Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This study aims to analyze Indonesia's diplomatic strategy in maintaining sovereignty in the region using the Mandala theory perspective. The Mandala theory, which originates from the traditional Asian power system, offers a conceptual framework that places the state as the center of power with a layered circle of influence. This study uses a qualitative method through a literature review approach by analyzing various academic sources, government policies, and scientific news data. The results of the study show that Indonesia's diplomatic strategy includes strengthening power (Mandala Inti), forming a central regional alliance (Sandhi), an active free neutral stance (Asana), and the duality of hard and soft strategies (Dvaidhibhava). The integration of the active free diplomacy approach and the Mandala theory allows Indonesia to implement an adaptive, contextual, and local value-based foreign policy in the face of geopolitical pressure. This study contributes to the development of Indonesian diplomacy studies by enriching theoretical perspectives through non-Western approaches that are relevant to the character of the Southeast Asian region.

Keywords: Indonesian Diplomacy, North Natuna Sea, Mandala Theory, Maritime Sovereignty, Nine-Dash Line.

Abstrak

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan maritimnya, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki nilai geopolitik tinggi. Kawasan ini menghadapi ancaman dari klaim sepihak Tiongkok melalui kebijakan Nine-Dash Line yang bertentangan dengan prinsip UNCLOS 1982 dan mengganggu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah tersebut dengan menggunakan perspektif teori Mandala. Teori Mandala, yang berasal dari sistem kekuasaan Asia tradisional, menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan dengan lingkaran pengaruh berlapis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka dengan menganalisis berbagai sumber akademik, kebijakan pemerintah, dan data berita diplomatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia mencakup

penguatan pusat kekuasaan (Mandala Inti), pembentukan aliansi kawasan (Sandhi), sikap netral bebas aktif (Asana), serta dualitas strategi keras dan lunak (Dvaidhibhava). Integrasi antara pendekatan diplomasi bebas aktif dan teori Mandala memungkinkan Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang adaptif, kontekstual, dan berbasis nilai lokal dalam menghadapi tekanan geopolitik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi diplomasi Indonesia dengan memperkaya perspektif teoritis melalui pendekatan non-Barat yang relevan dengan karakter kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: Diplomasi Indonesia, Laut Natuna Utara, Teori Mandala, Kedaulatan Maritim, Nine-Dash Line.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan strategis terhadap pengelolaan dan perlindungan wilayah lautnya. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 km dan 17.504 pulau, sekitar dua pertiga dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas perairan seluas 6.400.000Km², sedangkan daratannya mencakup area seluas 1.900.000 Km² (Prasetyo et al., 2019). Indonesia sangat bergantung pada keamanan dan stabilitas maritim untuk mendukung kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan luar negerinya (Wirawan, 2022). Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Laut Natuna Utara, yang terletak di perairan bagian utara Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis bagi negara ini, baik dari segi geopolitik, ekonomi, maupun sumber daya alam. Wilayah ini kaya akan potensi minyak, gas bumi, dan ikan, serta merupakan jalur pelayaran internasional yang vital. Namun, Laut Natuna Utara juga menjadi titik persaingan geopolitik yang intens, terutama dengan klaim territorial yang diajukan oleh China melalui kebijakan *Nine-Dash Line*. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan maritimnya di wilayah ini, mengingat dinamika politik internasional yang terus berkembang dan klaim dari negara-negara lain atas sebagian wilayah laut tersebut (Mahyudin et al., 2022; Wahyudi Bolkiah et al., 2024). Klaim sepahak Tiongkok melalui "*nine-dash line*" telah menimbulkan ketegangan yang berpotensi mengancam kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di kawasan tersebut. Atas klaim kendali territorial, kebebasan navigasi, perikanan, jalur pelayaran, dan eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas di wilayah laut cina Selatan (Ahmad et al., 2021).

Fenomena Konflik ini dapat dilihat, misalnya, dalam berita Mongabay (Sahputra, 2024) yang melaporkan keberhasilan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) mengusir kapal *Coast Guard China* (CCG) dari wilayah Laut

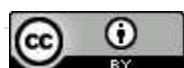


Natuna Utara. Pengusiran tersebut bukanlah yang pertama, melainkan yang ketiga kalinya, menunjukkan pola pelanggaran yang sistematis dan terulang. Demikian pula, dalam berita Koransatu.id (Bento, 2025) kembali dilaporkan adanya aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing, yang memunculkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPR RI yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai strategi diplomasi bilateral dan multilateral, tantangan terhadap kedaulatan maritim belum berhasil diatasi secara tuntas. Diplomasi yang dilakukan sejauh ini belum cukup untuk menghentikan pelanggaran yang berulang, baik dalam bentuk pelayaran ilegal, eksplorasi sumber daya secara sepihak, maupun ketegangan militer terbuka.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pendekatan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara serta pentingnya Laut Natuna Utara dalam konteks geopolitik Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik. Misalnya, (Kusumah et al., 2022) membahas strategi pertahanan Indonesia melalui peningkatan kehadiran militer di Laut Natuna Utara sebagai bentuk respons terhadap dinamika regional. Sementara itu, (Fathun, 2020) menekankan pentingnya pendekatan diplomasi dalam memperkuat posisi Indonesia di ASEAN guna menghadapi tekanan Tiongkok. Di sisi lain, (Grace Nada et al., 2021) menyatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menghadapi klaim territorial tersebut dan perlu menggunakan diplomasi multilateral sebagai salah satu pendekatan utama. Namun, meskipun banyak kajian yang ada, sedikit yang membahas bagaimana teori Mandala dapat diterapkan dalam memahami kebijakan diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya di Laut Natuna Utara.

Berdasarkan kajian tersebut, Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia melalui perspektif teori Mandala dalam konteks Laut Natuna Utara. Teori Mandala, yang dikembangkan oleh Hans Morgenthau, menjelaskan bagaimana negara mengelola kepentingannya melalui pembentukan zona pengaruh yang sesuai dengan prinsip kedaulatan dan keamanannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori Mandala untuk mengkaji strategi diplomasi Indonesia dalam mengatasi tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara, yang jarang ditemukan dalam kajian-kajian terdahulu.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara dengan menggunakan perspektif teori Mandala. Penelitian ini



diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks diplomasi maritim dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di tengah tantangan internasional yang semakin kompleks.

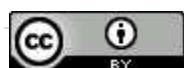
KAJIAN PUSTAKA

Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen utama dalam politik luar negeri yang digunakan negara untuk mencapai tujuan nasionalnya secara damai. (Berridge, 2015) menyatakan bahwa diplomasi tidak hanya terbatas pada perundingan antarnegara, tetapi juga mencakup strategi komunikasi, pengaruh, dan perwakilan yang dirancang untuk mempertahankan kepentingan nasional dalam ranah internasional. Dalam dinamika hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan luar negerinya. Tidak jarang, kepentingan tersebut mengalami irisan atau bahkan pertentangan dengan kepentingan negara lain, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan hingga berujung pada konflik. Untuk mengupayakan pencapaian dan perlindungan atas kepentingan nasional tersebut, negara-negara umumnya menempuh jalur diplomasi sebagai instrumen utama. Diplomasi seringkali dikategorikan sebagai bentuk *soft power*, sedangkan penggunaan kekuatan militer lebih cenderung dikaitkan dengan *hard power* dalam hubungan internasional (Sudarsono et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, strategi diplomasi menjadi penting untuk menjaga kedaulatan maritim, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti Laut Natuna Utara.

Teori Kepentingan

Terdapat berbagai pandangan dari para ahli dalam menjelaskan makna dan definisi kepentingan nasional. H.J. Morgenthau dalam (Sudarsono et al., 2018) mengemukakan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk menjaga dan mempertahankan identitasnya, baik secara fisik, politik, maupun budaya, dari ancaman yang berasal dari negara lain. Berdasarkan perspektif ini, para pemimpin negara kemudian merancang kebijakan yang bersifat khusus terhadap negara lain, yang dapat berwujud dalam bentuk kerja sama maupun konflik. Lanjutnya (Sudarsono et al., 2018) mengutik



pernyataan Paul Seabury yang memandang kepentingan nasional dari dua perspektif. Secara deskriptif, kepentingan nasional dipahami sebagai tujuan yang harus senantiasa dicapai oleh suatu bangsa melalui kepemimpinan negara. Sementara itu, dalam perspektif normatif, kepentingan nasional merupakan himpunan cita-cita kolektif suatu bangsa yang diupayakan pencapaiannya melalui interaksi dan hubungan dengan negara lain. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh suatu negara, yang mencakup berbagai sektor kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan.

Teori Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan, diperlukan penerapan strategi yang tepat guna mendukung keberhasilan proses pencapaian tersebut. Menurut Alfred dalam (Yulianti, 2019) strategi berperan sebagai instrumen penting dalam menentukan sasaran serta merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga mencakup perencanaan program tindak lanjut serta penetapan prioritas dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Sedangkan, Mintzberg dalam (Pella, 2016) mengemukakan bahwa strategi merupakan pendekatan atau kondisi yang diwujudkan dalam bentuk rencana maupun pola tindakan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Strategi mencakup pendekatan menyeluruh terhadap suatu ide, gagasan, proses perencanaan, hingga tahap pelaksanaan kegiatan. Melalui strategi tersebut, organisasi memperoleh arahan umum yang menjadi pedoman dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai apakah suatu strategi efektif atau tidak, Richard P. Rumelt dalam (Taufiqurokhman, 2016) mengemukakan empat komponen utama sebagai indikator evaluasi. Pertama, *consistency*, yaitu keselarasan antara sasaran dan kebijakan dalam strategi sehingga tidak terdapat kontradiksi internal. Kedua, *consonance*, yang menekankan pentingnya kemampuan strategi dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan eksternal dan tren yang berkembang. Ketiga, *advantage*, yaitu sejauh mana strategi mampu menciptakan serta mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang tertentu. Keempat, *feasibility*, yakni strategi harus realistik dan dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia tanpa menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Teori Mandala



Salah satu pendekatan konseptual yang relevan untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia adalah teori Mandala. Teori ini berasal dari pemikiran klasik politik Asia Tenggara yang kemudian dimodernisasi dan digunakan dalam kajian geopolitik serta hubungan internasional. Menurut (Tambiah, 1976), konsep Mandala menggambarkan struktur kekuasaan yang bersifat konsentris, di mana pusat kekuasaan membangun pengaruh ke arah luar dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang mencerminkan zona pengaruh dan kontrol. Dalam versi yang lebih kontemporer, (Morgenthau, 2017) memformulasikan teori kekuasaan negara melalui pendekatan realistik, bahwa negara harus memproyeksikan keuatannya ke luar wilayah inti untuk mempertahankan eksistensinya. Konsep ini sejalan dengan prinsip geopolitik modern, di mana negara-negara berdaulat perlu menjaga lingkaran pengaruhnya sebagai bagian dari pertahanan strategis.

Teori Mandala, sebagai representasi dari teori non-Barat, mengidentifikasi enam strategi utama yang digunakan negara dalam menghadapi situasi berbeda, yakni: 1) *Sandhi* (aliansi untuk memperkuat posisi), 2) *Vigraha* (konfrontasi oleh negara kuat), 3) *Asana* (netralitas antar negara setara), 4) *Yana* (keputusan untuk berperang secara rasional), 5) *Samsraya* (meminta perlindungan dari negara kuat), dan 6) *Dvaidhibhava* (mencari dukungan damai untuk menghadapi lawan). Keenam strategi ini mencerminkan tipologi kekuatan negara: *great power* (*Sandhi*, *Vigraha*), *middle power* (*Asana*), *less power* (*Samsraya*), dan *raison d'état* atau negara oportunistis (*Dvaidhibhava*), serta *deliberative state* (*Yana*) (Shahi, 2019; Bist, 2020; Dellios, 2003) dalam (Fathun, 2016).

Kautilya dalam (Dellios, 2003) menyatakan bahwa Teori Mandala adalah salah satu pemikiran penting dalam *Arthashastra* yang membahas hubungan antarnegara. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara bisa dianggap sebagai teman atau lawan, tergantung pada posisi geografinya terhadap negara lain. Kautilya menguraikan pandangan ini dengan mengambil contoh dari *Manusmriti* dan *Mahabharata*. Menurutnya, jika sebuah negara ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan negara lain, maka negara tersebut perlu membangun lebih banyak aliansi, sebanding dengan jumlah musuh yang dihadapi. Tujuannya adalah agar negara tetap bisa menjaga pengaruhnya atas wilayah-wilayah di sekitarnya.

Kesenjangan Teori (*Theoretical Gap*)

Meskipun terdapat banyak literatur yang membahas strategi diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara, sebagian besar penelitian masih menggunakan



pendekatan teori realisme atau liberalisme dalam hubungan internasional. Kajian yang secara eksplisit mengadopsi teori Mandala untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia masih sangat terbatas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan teori dalam literatur akademik saat ini. Padahal, teori Mandala memiliki potensi besar dalam memberikan kerangka analisis alternatif yang lebih kontekstual dengan sejarah dan budaya politik Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

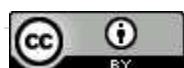
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara. (Ridwan et al., 2021) Menjelaskan, secara umum, kajian pustaka merupakan rangkuman teori dan informasi yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan. Tinjauan ini tidak hanya membantu memberikan dasar teori dalam penelitian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pengumpulan data, terutama dalam penelitian eksperimental. Selain itu, kajian pustaka memberikan gambaran konteks masa lalu yang berguna untuk mendukung penelitian terbaru. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen resmi pemerintah, serta berita diplomatik dari media kredibel. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menggambarkan dinamika diplomasi Indonesia serta memahami maknanya dalam kerangka teori Mandala. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola strategi diplomasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Diplomasi Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia, baik dari sisi keamanan nasional, potensi sumber daya alam, hingga posisi geografis sebagai jalur perdagangan internasional. Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar, khususnya klaim Tiongkok melalui *Nine-Dash Line* yang bertentangan dengan prinsip UNCLOS 1982. Klaim tersebut secara sepihak memasukkan sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ke dalam wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.

Menanggapi hal ini, Indonesia telah mengembangkan pendekatan diplomatik yang mencakup penguatan posisi hukum di kancah internasional, dialog bilateral dan multilateral, serta peningkatan kerja sama dengan ASEAN. Menurut penelitian



yang dilakukan oleh (Kusumah et al., 2022), kehadiran TNI AL dan Bakamla di Laut Natuna merupakan bagian dari strategi pertahanan maritim yang bersifat simultan dengan pendekatan diplomatik. Situasi ini menuntut respons strategis dari Indonesia yang tidak hanya bersifat pertahanan, tetapi juga diplomatik dan bersandar pada kebijakan luar negeri bebas aktif. Dalam konteks ini, teori Mandala yang dikembangkan dari sistem politik Asia tradisional dapat digunakan untuk memahami pendekatan Indonesia dalam merespons konflik ini secara simbolik dan fungsional.

Strategi Diplomasi Indonesia dalam Perspektif Teori Mandala

Teori Mandala menjelaskan bahwa pusat kekuasaan (raja atau negara) membentuk lingkaran pengaruh yang berlapis, dengan pendekatan hubungan yang bersifat fleksibel, situasional, dan bersandar pada keseimbangan kekuatan. Pendekatan ini sangat relevan dengan strategi Indonesia di Laut Natuna Utara, yang terdiri dari beberapa aspek:

1) Penguatan Pusat Kedaulatan (Mandala Inti)

Strategi pertama bertujuan untuk memperkuat pusat kekuasaan negara Indonesia di wilayah perbatasan yang menjadi sengketa, yakni Laut Natuna Utara. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- a) Penempatan TNI AL dan Bakamla secara intensif di wilayah ZEE Natuna, yang memiliki potensi ancaman dari negara-negara lain, terutama Tiongkok, dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.
- b) Pembangunan infrastruktur pertahanan dan pelabuhan perikanan di Ranai dan sekitarnya untuk mendukung operasional TNI dan Bakamla, serta meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman di wilayah perbatasan.
- c) Peningkatan patroli dan penegakan hukum laut guna menjaga kestabilan dan kedaulatan maritim di wilayah Natuna dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum internasional, seperti illegal fishing dan pelanggaran batas wilayah.

Strategi ini mencerminkan penguatan pusat kekuasaan, atau Mandala Inti, yang harus mampu memancarkan kekuasaan, stabilitas, dan pengaruh ke lingkaran luar. Sebagai pusat kekuasaan dalam sistem Mandala, Natuna menjadi simbol kekuatan Indonesia di kawasan maritim..

2) Lingkaran Aliansi (*Sandhi*): Kerja sama Kawasan dan internasional



Strategi kedua menekankan pentingnya menjalin dan memanfaatkan aliansi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas maritim, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional:

- a) Mendorong penguatan peran ASEAN dalam menyelesaikan isu-isu Laut Tiongkok Selatan, melalui dialog dan kerja sama dalam pembentukan standar hukum dan keamanan di kawasan tersebut.
- b) Meningkatkan kerja sama dengan negara mitra strategis seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat dalam hal keamanan maritim, termasuk dalam pelatihan, patroli bersama, dan pertukaran informasi untuk menanggulangi ancaman keamanan.
- c) Memperkuat norma hukum internasional (UNCLOS) melalui diplomasi hukum internasional, guna memastikan bahwa hak-hak Indonesia di Laut Natuna Utara dilindungi secara hukum dalam forum internasional.

Strategi ini mencerminkan ekspansi pengaruh pusat (Mandala Inti) ke lingkaran luar, di mana Indonesia mengembangkan buffer politik melalui aliansi-aliansi yang menguntungkan tanpa kehilangan kemandirian politik..

3) Strategi Netralitas (*Asana*): Bebas Aktif dan Tidak Memihak

Indonesia harus tetap mempertahankan posisi netral dan bebas aktif dalam hubungan internasional, dengan tidak berpihak pada kekuatan besar manapun. Strategi ini dijalankan dengan:

- a) Menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan volume perdagangan.
- b) Menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam konteks isu-isu keamanan maritim dan proteksi terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
- c) Tidak membentuk aliansi militer yang bersifat mengikat secara sepihak dengan negara manapun, untuk menjaga fleksibilitas Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Konsep Asana dalam Mandala ini menggambarkan posisi Indonesia yang stabil dan tidak berpihak, sehingga Indonesia bisa berdiri di tengah-tengah kekuatan yang bersaing, sambil tetap menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan maritim.

4) Dualitas Strategis (*Dvaidhibhava*): Hubungan Ganda Dengan Kekuatan Besar



Strategi keempat adalah menggunakan diplomasi dua arah yang dapat menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepentingan nasional Indonesia. Ini dilakukan dengan cara:

- a) Diplomasi keras (*hard diplomacy*): Indonesia dapat mengeluarkan nota protes secara diplomatik dan melaksanakan operasi militer terbatas saat terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal asing, khususnya Tiongkok, yang melakukan aktivitas ilegal di ZEE Natuna.
- b) Diplomasi lunak (*soft diplomacy*): Di sisi lain, Indonesia tetap membuka dialog bilateral dengan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, guna menghindari ketegangan yang berlarut-larut dan menjaga hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Pendekatan ini menggambarkan *Dvaidhibhava* dalam Mandala, yaitu kemampuan negara untuk menjalankan dua pendekatan yang berbeda secara simultan, yaitu kebijakan tegas ketika diperlukan dan diplomasi yang konstruktif untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Integrasi Teori Mandala dan Diplomasi Indonesia

Diplomasi Indonesia yang bebas aktif tetap relevan dan bahkan semakin kuat ketika disandingkan dengan kerangka berpikir lokal seperti teori Mandala. Kedua pendekatan ini saling memperkuat dalam merumuskan sikap luar negeri Indonesia: tidak agresif, namun tegas dalam mempertahankan kedaulatan; tidak memihak, namun aktif dalam membangun konsensus regional dan global. Teori Mandala, yang berakar dari sistem kekuasaan tradisional Asia Tenggara, memberikan dimensi strategis tambahan dalam memahami posisi dan langkah Indonesia di antara kekuatan besar dunia. Dalam konteks Laut Natuna Utara, Indonesia bertindak sebagai “raja” dalam pusat Mandala yang berdaulat—mengedepankan stabilitas domestik, kontrol atas wilayah, dan proyeksi pengaruh ke lingkaran luar melalui hubungan internasional yang dinamis.

Selain menguatkan pendekatan diplomasi yang fleksibel, penelitian ini juga mengisi kekosongan dalam kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek operasional seperti penguatan militer atau diplomasi formal dalam kerangka ASEAN. Pendekatan-pendekatan tersebut belum banyak menggali fondasi konseptual yang berasal dari khasanah lokal kawasan, padahal Indonesia sebagai negara maritim dan berbudaya Asia memiliki cara pandang strategis yang berbeda dari model Barat. Dengan mengintegrasikan teori Mandala, penelitian ini menghadirkan perspektif alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik



Asia Tenggara, serta memberikan ruang bagi pemetaan kepentingan nasional secara simbolik dan fungsional. Konsep penguatan pusat kekuasaan (mandala inti) di Natuna, ekspansi pengaruh melalui aliansi regional (*sandhi*), netralitas aktif (*asana*), dan diplomasi dua arah (*dvaidhibhava*) menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan luar negeri yang cerdas, berdaulat, dan berakar pada jati diri nasionalnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan strategis terhadap kedaulatan maritimnya, khususnya di Laut Natuna Utara yang menjadi wilayah kaya sumber daya alam dan memiliki nilai geopolitik tinggi. Tantangan utama di kawasan ini datang dari klaim sepihak Tiongkok melalui "Nine-Dash Line" yang bertentangan dengan prinsip UNCLOS 1982 dan mengganggu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dalam menanggapi dinamika ini, Indonesia tidak hanya menerapkan langkah militer melalui TNI AL dan Bakamla, tetapi juga menempuh strategi diplomasi aktif yang bersifat multilateral, bilateral, dan berbasis hukum internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori Mandala memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami strategi diplomasi Indonesia. Melalui konsep penguatan pusat kekuasaan (Mandala Inti), aliansi kawasan (*Sandhi*), dan strategi hubungan adaptif lainnya, Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatannya secara strategis, simbolik, dan fungsional. Penggunaan teori Mandala menambah dimensi kultural dan geopolitik Asia Tenggara dalam analisis kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini didominasi oleh teori barat seperti realisme dan liberalisme.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia terus memperkuat pendekatan diplomasi maritim secara berkelanjutan, khususnya melalui jalur multilateral seperti ASEAN dan kerja sama internasional lainnya, untuk menghadapi klaim sepihak dari Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan strategi pertahanan secara terpadu dengan pendekatan diplomasi berbasis budaya dan sejarah politik kawasan, seperti konsep Mandala, agar strategi diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam membentuk pengaruh di kawasan Asia Tenggara.



Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim dan peningkatan kapasitas lembaga seperti Bakamla dan TNI AL di wilayah perbatasan harus dilanjutkan untuk menunjang kehadiran negara di lapangan. Dukungan terhadap kajian strategis dan literatur alternatif, seperti penggunaan teori Mandala dalam analisis kebijakan luar negeri, juga perlu ditingkatkan guna memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan dan pembentukan strategi diplomasi Indonesia yang kontekstual dan relevan dengan realitas geopolitik Asia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A., Salleh, M. A. B., & Ladiqi, S. (2021). China-ASEAN Disputes on South China Sea and the Implication of US Involvement. *International Journal of Contemporary Architecture "The New ARCH"* Vol. 8, No. 2 (2021), April 2021.
- Bento. (2025, April 30). Pencurian Ikan Kembali Lagi di Natuna, Puan: Kedaulatan RI Harus dijaga. *Koransatu.Id*. <https://koransatu.id/pencurian-ikan-kembali-lagi-di-natuna-puan-kedauletan-ri-harus-dijaga/>
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Dellios, R. (2003). Mandala : from sacred origins to sovereign affairs in traditional Southeast Asia. *Centre for East-West Cultural and Economic Studies*, 10, 1–16.
- Fathun, L. M. (2016). Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menjaga Stabilitas Geopolitik Keamanan Maritim Wilayah Nusantara Perspektif Konstruktivisme. *UPN Veteran JAkarta*, 1–14.
- Fathun, L. M. (2020). Pemaknaan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Pulau Natuna Perspektif Teori Mandala. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(2), 101–114.
- Grace Nada, C., Virginia Adela, R., Angela, Y., Permana, G., Shininta, R., & Gaudialmo, S. (2021). Peran Penting Diplomasi Multilateral Indonesia Melalui Kerangka ASEAN dalam Proses Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Sentris*, 188–209. <https://doi.org/10.30996/jhbdc>.
- Kusumah, M. I., Syahtria, I., Sianturi, D., Yudho, L., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi TNI Guna Mendukung Komando Dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2819–2831.
- Mahyudin, E., Alam, G. N., Affandi, R. N., Dermawan, W., & Azmi, F. (2022). Challenges and Implications of Indonesia's Strategic Position in Maritime Security. *Journal of Governance*, 7(2), 437–442.



- <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15169>
- Morgenthau, S. J. (2017). Politics among nations. In *Politics Among Nations* (pp. 1–101). <https://doi.org/10.4324/9781912282289>
- Pella, D. A. (2016). *Problem Implementasi Strategi: Temukan dan Atasi Penyebab Kegagalan Implementasi Strategi di Organisasi Anda*. Jakarta: Aida Infini Maksima.
- Prasetyo, K. A., Yudho Prakoso, L., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim (Marine Defense Strategy the Government of Indonesia in Keeping Maritime Security). *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 31–50.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Sahputra, Y. E. (2024, November 6). Konflik Laut Natuna: Bakamla RI Berhasil Usir Coast Guard China, Bagaimana Selanjutnya? *Mongabay*. <https://mongabay.co.id/2024/11/06/konflik-laut-natuna-utara-bakamla-ri-berhasil-usir-coast-guard-china-bagaimana-selanjutnya/>
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & D.W., S. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 83–102. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441>
- Taufiqurokhman, M. M. S. (2016). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Wahyudi Bolkiah, A., Setiawan, A., & Usni, U. (2024). China's Response To Indonesia's Policies In The North Natuna Sea. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 3(2), 47–60. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.7084>
- Wirawan, D. (2022). Maritime Security Increases Defense Diplomacy in the World Maritime Axis Framework. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1). <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.892>
- Yulianti, D. (2019). *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

